

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kerjasama bilateral Indonesia dan Jepang telah terjalin sejak tahun 1958. Sejak saat itu, kerjasama di antara kedua Negara telah menghasilkan beberapa kesepakatan, seperti *The Strategic Economic Partnership Agreement* pada tahun 2006 dan *Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement* pada tahun 2007, serta yang terbaru adalah pembentukan *Indonesia-Japan Maritime Forum* pada tahun 2016¹.

Kerjasama Indonesia-Jepang dalam bidang ekonomi sendiri direkomendasikan setelah Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono dan mitranya Perdana Menteri Jepang, Shinzo Abe, disela-sela pertemuan APEC November 2004 untuk sepakat membahas kemungkinan pembentukan kerjasama ekonomi. Pembicaraan tersebut ditindak lanjuti antara Menteri perdagangan kedua negara pada bulan Desember 2004 dengan Joint Study Group (JSG) sebagai langkah awal. Hasil JSG merekomendasikan manfaat perlunya *Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement* (IJEPA), diikuti dengan 6 (enam) kali perundingan/negosiasi sejak Juli 2005 sampai November 2006².

Perjanjian ditandatangani dan diratifikasi pada 20 Agustus 2007 dan mulai berlaku secara resmi sejak 1 Juli 2008. Kerjasama IJEPA ini dilandasi atas tiga

¹ Lisbet, "Peningkatan kerjasama bilateral Indonesia-Jepang" majalah *Info Singkat* Vol.IX, no 02/II.Puslit/Janusary/2017 : 5 pada http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/info%20Singkat-IX-2-11-P3DI-Januari-2007-238.pdf diakses 14 Maret 2019 15.13

²Anonim, BAB II: 7 dalam <http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/711/jbptunikompp-gdl-ariwigiart-35511-7-babiii.pdf>

pilar , yaitu: satu, *Liberalization* (Pembukaan akses pasar), upaya bersama untuk memperbaiki iklim investasi dan meningkatkan tingkat kepercayaan bagi investor Jepang, juga kerjasama dibidang prosedur kepabeanan, pelabuhan dan jasa-jasa perdagangan. Kedua, *Facilitation* (Akses pasar yang mudah), menghapuskan/mengurangi hambatan perdagangan dan investasi (bea masuk, memberi kepastian hukum. Ketiga, *Cooperation* (Kerjasama untuk meningkatkan kapasitas), kesempatan untuk kerjasama dan meningkatkan kapasitas Indonesia sehingga lebih mampu bersaing dan memanfaatkan secara optimal peluang pasar dari EPA³.

Ketiga landasan tersebutlah yang membuat sistem EPA lebih unggul dari FTA karena menempatkan Indonesia pada posisi yang sejajar (kemitraan) sehingga dalam mengimplikasinya akan menguntungkan kedua belah pihak, berpotensi menghasilkan keuntungan yang sangat besar dalam peningkatan di bidang ekspor⁴. Bagi Jepang, IJEPA merupakan kebijakan perdagangan internasional dimana sebelumnya hanya menganut multilateralisme melalui WTO, sedangkan bagi Indonesia, kerjasama ini tentunya untuk memenuhi kepentingan nasional bidang ekonomi khususnya perluasan akses pasar produk ekspor dipasar Jepang⁵

Perjanjian IJEPA itu sendiri mencakup berbagai bidang, yaitu : *Trade in goods* (perdagangan), *Rules of Origin* (Peraturan dasar), *Custom Procedure*

³Muh.Miftachun Niam, “Efektivitas *Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement* Dalam Meningkatkan Ekonomi Di Indonesia”: 1 pada https://www.academia.edu/844566/Efektivitas_Indonesia_Japan_Economic_Partnership_Agreement_dalam_Meningkatkan_Ekspor_di_Indonesia di akses 10 Oktober 2018 1.24

⁴ Niam, Muh Miftachun: 3

⁵Anonim, “BAB I” : 2<http://eprints.umm.ac.id/27792/2/jiptumpp-gdl-muhammadaz-31916-2-bab1.pdf>

(Prosedur tentang ekspor impor dan bea cukai), *Trade in Service* (Perdagangan jasa), *investment* (Investasi), *movement Of natural Person* (Pergerakan alami manusia), *Government Procurement* (Pengadaan Pemerintah), *Intellectual Proerty Rights* (Hak milik Intelektual), *competition Policy* (Kebijakan mengenai persaingan usaha), *Energy and Mineral Resources* (Sumber daya energi dan mineral), *Cooperation* (Kerjasama).⁶

Perjanjian kemitraan ekonomi Indonesia dan Jepang (*Indonesian Japan Economic Partnership Agreement*) IJEPA yang ditandatangani tahun 2007 lalu tidak hanya berupaya meningkatkan investasi dan perdagangan bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang lebih baik, selain itu IJEPA juga berpengaruh terhadap sektor tenaga kerja yaitu dengan pengiriman tenaga kerja Indonesia ke Jepang.

Penempatan Tenaga kerja Indonesia perawat ke luar negeri menurut Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor KEP-104A/MEN/2002), merupakan program nasional dalam upaya peningkatan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya serta pengembangan kualitas sumber daya manusia. Penempatan tenaga kerja ke luar negeri dilakukan dengan memanfaatkan pasar kerja internasional melalui peningkatan kualitas kompetensi tenaga kerja disertai dengan perlindungan yang optimal sejak sebelum keberangkatan, selama bekerja diluar negeri sampai tiba kembali ke Indonesia⁷.

⁶Sita Dewi, "Dampak Perjanjian Perdagangan Indonesia-Jepang (IJEPA) terhadap Indonesia", : 1 dalam https://www.academia.edu/35339386/DAMPAK_PERJANJIAN_PERDAGANGAN_INDONESIA_A-JEPANG_IJEPA_TERHADAP_INDONEISA

⁷Shena Ramadhan, "Peranan Indonesia Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA) dalam pengiriman tenaga kerja Indonesia (TENAGA KERJA INDONESIA) sektor formal (nurse) ke Jepang. (2016)

Pengiriman Tenaga Kerja Indonesia dilakukan ke negara-negara ekonomi maju di sekitar Asia seperti Jepang, Taiwan, Singapura, Brunei Darussalam, Korea, Malaysia dan juga ke negara Arab. Pengiriman Tenaga Kerja Indonesia dilakukan dikarenakan permintaan yang tinggi dari negara-negara tujuan tersebut juga disebabkan beberapa hal, yaitu sempitnya lapangan pekerjaan di Indonesia, dan juga besarnya gaji serta fasilitas yang dijanjikan.

Pengiriman perawat ke Jepang menggunakan sistem *Government to Government* (G to G) dengan menindaklanjuti adanya Nota kesepahaman atau *Memorandum of Understanding (MoU)* antara pemerintah Indonesia (Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia/BNP2TKI) dengan pemerintah Jepang (The Japan International Corporation of Welfare Service/JICWELS) tentang penempatan calon perawat (Kangoshi) dan calon Careworker (Kaigofukushishi) dari Indonesia ke Jepang (Program G to G Jepang)⁸. Permintaan perawat oleh pemerintahan Jepang merupakan salah satu poin yang tertuang dalam IJEPA⁹, juga berdasarkan kondisi domestik Indonesia yang saat itu mengalami kelebihan tenaga kerja perawat (surplus) dan berkurangnya peluang tenaga kerja bagi perawat di Indonesia. Berdasarkan data statistic dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia di tahun 2007, tercatat permintaan tenaga kerja sebagai perawat sebesar 18.731 orang sedangkan lulusan sekolah keperawatan Indonesia saat itu sebesar 25.200 orang, sehingga terdapat

⁸ “Memorandum Of Understanding Between The Nasional Board for the Placement and Protection Indonesian Overseas Workers and The Japan Internasional Corporation of Welfare Services”, salinan MoU dari BP3TKI Yogyakarta untuk Peneliti, 14 Februari 2017.

⁹ “*Pengiriman TKI ke Jepang*,”<http://www.kabarindonesia.com> diakses pada tanggal 16 Maret 2019, ,

kelebihan (surplus) jumlah pesawat sebesar 6.469 pekerja¹⁰ Perbandingan tersebut menunjukkan Indonesia telah mengalami surplus tenaga keperawatan dan defisit pada permintaan pekerjaan di Indonesia terutama lulusan sekolah/akademi keperawatan (akper) ataupun perguruan tinggi keperawatan. Setelah IJEPA disepakati oleh pihak Indonesia dan Jepang di tahun 2008, maka permintaan pengiriman perawat Indonesia ke Jepang mendapat respon positif dari Jepang. Dengan adanya program G to G ke Jepang mempermudah akses tenaga kerja perawat Indonesia untuk bekerja di Jepang sebagai pekerja terampil (*skilled worker*). Melalui Implementasi IJEPA, dalam program G to G tersebut terdapat *training*/pelatihan dan pembekalan sebelum dan selama bekerja di Jepang¹¹. Oleh karena itu penulis bermaksud melakukan penelitian yang berjudul “Implementasi IJEPA dalam pengiriman perawat Indonesia ke Jepang.”

1.2 Rumusan Masalah

IJEPA sebagai salah satu bentuk FTA khusus telah berlangsung efektif hampir mencapai empat tahun, dan sudah berdampak bagi perekonomian Indonesia dan Jepang. Adapun tujuan dari penilaian suatu FTA adalah untuk mengetahui apakah tujuan suatu FTA dapat dipenuhi. Dalam bidang ekspor-impor terlebih sudah banyak analisis yang membuktikan dampak positif terhadap Indonesia setelah diberlakukannya IJEPA. Namun salah satu yang penting untuk dievaluasi adalah implementasinya terhadap sektor tenaga kerja terkhusus perawat. Dengan Indonesia yang mengalami surplus tenaga kerja keperawatan

¹⁰ BPPSMD Kesehatan dari Kemenkes RI tahun 2007, “Profil Pengembangan dan pemberdayaan Sumber Daya manusia tahun 2007”, hal 40

¹¹Yoshiko Naiki, “Migration of Health Workers Under the Japan-Philippines and Japan-Indonesia Economic Partnership Agreements: Challenges and Implications of the Japanese Training Framework”, hal. 1

tidak memiliki lapangan pekerjaan yang cukup, sedangkan Jepang kekurangan sumber daya Manusia khusus bidang keperawatan. Saling ketergantungan ini dimasukkan dalam point IJEPA, kemudian dibentuknya program G to G untuk melatih pekerja Indonesia menjadi *skilled worker* guna menambah daya saing Indonesia di Jepang. Oleh karena itu menarik untuk melihat bagaimana implementasi IJEPA terhadap tenaga kerja perawat.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka pertanyaan penelitian yang akan dijadikan sebagai dasar analisa dalam penelitian ini adalah “Bagaimana implementasi *Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement* (IJEPA) terhadap pengiriman perawat Indonesia ke Jepang ?”

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian di atas penelitian ini penulis ingin mengetahui implementasi kerjasama IJEPA bagi Indonesia dalam pengiriman Perawat ke Jepang.

1.5 Manfaat Penelitian

- a. Melalui penelitian ini, penulis berharap memberikan penjelasan mengenai bagaimana implementasi IJEPA terhadap perekonomian Indonesia khususnya dalam bidang keperawatan.
- b. Melalui penelitian ini, penulis berharap untuk memberikan informasi dan bahan kajian para mahasiswa, khususnya studi Hubungan Internasional serta pemerhati masalah-masalah dunia internasional.

1.6 Studi Pustaka

Dalam studi pustaka ini penulis bermaksud untuk membandingkan penelitian ini dengan penelitian-penelitian yang telah membahas fenomena ini sebelumnya, baik berkaitan langsung maupun tidak langsung. Dalam pencariannya penulis menemukan beberapa jurnal, skripsi, hasil penelitian dan buku yang dianggap relevan dengan penelitian yang penulis teliti.

Jurnal pertama, penulis menggunakan tulisan dari Levi Gocklas C.S dan Sri Sulasmiyati tentang *analisis pengaruh Indonesian-Japan Economic Partnerhip Agreement (IJEPA) terhadap perdagangan Indonesia-Jepang (Study pada badan pusat statistic periode 2000-2016)*. Tulisan ini menjabarkan bagaimana hubungan kerjasama ekonomi Indonesia-Jepang terkhusus pada bidang perdagangan dalam pengimplikasiannya terhadap IJEPA menggunakan *uji T perpasangan*. Penulis memaparkan tabel-tabel berisi hasil pengujian dan hasil analisis. Berdasarkan hasil pengujian, perdagangan Indonesia-Jepang berdampak surplus bagi Indonesia namun cenderung berfluktuasi, juga nilai perdagangan setelah penerapan IJEPA mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan sebelum penerapan¹².

Dalam jurnal ini, penulis menggunakan analisis deskriptif dan analisis statistic Infensial untuk menilai ekspor dan impor sebelum dan sesudah pelaksanaan IJEPA, setelah data didapatkan kemudian hasil tersebut dipakai untuk melakukan uji parametik menggunakan *Uji T perpasangan (Paired sample T-test)*. Hasil tes

¹² Levi Gocklas C.S dan Sri Sulasmiyati, :*Analisis pengaruh Indonesia-Japan Economic partnership Agreement (IJEPA)///0 terhadap Perdagangan Indonesia Jepang*”, universitas brawijaya Malang, (2017): 191

menghasilkan rata-rata nilai ekspor pada saat sebelum dan sesudah diberlakukannya IJEPA mengalami peningkatan sebesar $>0,05$ ¹³.

Bahan selanjutnya, penulis menggunakan tulisan Septika tri Ardiyanti yang berjudul “*dampak Perjanjian perdagangan Indonesia-Jepang (IJEPA) terhadap kinerja perdagangan bilateral*”. Dalam tulisan ini, Septika membandingkan ekspor-impor sebelum (data Januari 1990 sampai Juni 2014) dan sesudah (Juli 2008 sampai Juni 2014). Hasil pengujian dengan metode *Autoregressive Integrated Moving Average* (ARIMA) dan uji T Perpasangan itu memperlihatkan peningkatan nilai ekspor non migas Indonesia ke Jepang, namun tidak memiliki dampak signifikan terhadap peningkatan nilai impor non migas Indonesia ke Jepang¹⁴.

Selanjutnya adalah jurnal dengan judul “*Analisis Dampak Indonesia Japan Economic Partnership Agreement terhadap Price-Cost Margins Industri Manufaktur Indonesia*”. Tulisan ini menganalisis bagaimana *Indonesia Japan Economic Partnership Agreement* (IJEPA) sebagai perjanjian kerjasama ekonomi bilateral pertama Indonesia yang diharapkan mampu meningkatkan kompetisi industri manufaktur, dimana disepakatinya fasilitas khusus untuk peningkatan kapasitas dan daya saing industri manufaktur, yaitu *User Spesific Duty Free Scheme* (USDFS) dan *Manufacturing Industry Development Center* (MIDEC)¹⁵. Setelah dijalankannya IJEPA, *Price-cost Margins* (PCM) Indonesia

¹³Levi Gocklas C.S dan Sri Sulasmiyati; 196.

¹⁴Septika tri Ardiyanti yang berjudul “*dampak Perjanjian perdagangan Indonesia-Jepang (IJEPA) terhadap kinerja perdagangan bilateral*”, pusat Kebijakan Luar negeri, BP2KP, Kementerian perdagangan RI. (2015): 149

¹⁵ Fitri Tri Budiarti dan Fitra faisal Hastiadi, “*Analisis Dampak Indonesia Japan Economic Partnership Agreement terhadap Price-Cost Margins Industri Manufaktur Indonesia*”, Pusat kebijakan Kerjasama perdagangan internasional, kementerian Perdagangan republic Indonesia, Direktorat Riset dan pengabdian masyarakat, Universitas Indonesia, (2015): 192

berfluktuasi. PCM digunakan sebagai indikator persaingan karena berhubungan dengan keuntungan rata-rata sebuah industri¹⁶.

Setelah pengimplementasian IJEPA, industri memanfaatkan fasilitas penurunan tarif untuk impor barang modal dan bahan baku. Impor bahan industri dengan tarif hingga 0% memungkinkan industri untuk produksi barang dengan biaya yang lebih murah, ekspor juga memberikan peningkatan keuntungan bagi industri untuk memperluas pasar dan peningkatan jumlah produk jual.¹⁷

Selanjutnya adalah jurnal David Adam Stott yang berjudul "*the Japan-Indonesia Economic Partnership: Agreement Between Equal?*". Tulisan ini menjabarkan mulai dari bagaimana acuan Jepang dalam melakukan kerjasama, hubungan ekonomi Indonesia Jepang, hingga terjadinya *Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement*. Penulis melihat bagaimana perspektif dari kedua negara. Dari perspektif Jepang, alasan utama Tokyo mengajukan IJEPA adalah untuk mengamankan pasokan energi yang stabil dan berkelanjutan. Indonesia telah menjadi pemasok gas alam terbesar ke Jepang sejak pertengahan 1970-an.¹⁸ Sedangkan dalam perspektif Indonesia, beberapa kalangan bisnis berpendapat bahwa jika IJEPA diterapkan dengan benar, maka bisa meliberalisasi dan merangsang perdagangan bilateral dan investasi yang pada akhirnya bisa menguntungkan kedua negara dan memecahkan penyakit ekonomi Indonesia melalui peningkatan investasi asing¹⁹. Namun beberapa penganalisis Indonesia memiliki kecurigaan bahwa IJEPA akan lebih menguntungkan Jepang dari pada

¹⁶ Fitri Tri Budiarti dan Fitra faisal Hastiadi, 193

¹⁷ Fitri Tri Budiarti dan Fitra faisal Hastiadi, 208

¹⁸ David Adam Scott, "*the Japan-Indonesia Economic Partnership: Agreement Between Equal?*" *the Asia-pacific Journal/japan Focus*. (2008); 7

¹⁹ David Adam Scott: 11

Indonesia. Fahmi Idris, Menteri Industri juga mengisyaratkan bahwa Jepang mungkin mendapat manfaat lebih dari kesepakatan karena tingginya produk teknologi sekarang membuat pajak impor lebih rendah, sedangkan ekspor utama Indonesia seperti produk pertanian dan kayu masih menghadapi hambatan non-tarif yang kuat karena standar kualitas yang ketat²⁰.

Selanjutnya tulisan dari Izma Khairanisa Harahap dan Astrid Maria Esther tentang *Dampak Penerapan Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement terhadap Ekspor Indonesia ke Jepang*. Dalam tulisan ini menjelaskan bagaimana pangsa ekspor Indonesia ke Jepang terlihat menurun selama periode 2000-2010, demikian pula dengan nilai investasi dari Jepang ke Indonesia cenderung menurun. Indonesia hanya menduduki posisi ke 8 sebagai destinasi investor Jepang, sementara sebelum krisis moneter 1997 Indonesia berada pada posisi 1, 2 atau ke-3²¹. Dengan diberlakukannya IJEPA membuka peluang pasar dan kegiatan ekspor karena dapat menempatkan Indonesia sejajar dengan negara pesaing pasar Jepang, dan dengan peningkatan ekspor Indonesia ke Jepang memberikan dampak peningkatan pendapatan nasional Indonesia sehingga menciptakan pertumbuhan ekonomi yang makin baik bagi Indonesia.²²

Pendapatan nasional merupakan fungsi dari ekspor yang artinya semakin besar negara mengekspor maka semakin besar pendapatan nasionalnya²³. Permintaan ekspor ke luar negeri dipengaruhi oleh harga barang ekspor dan

²⁰David Adam Scott: 11

²¹Izma Khairanisa Harahap dan Astrid Maria Esther, "*Dampak Penerapan Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement terhadap Ekspor Indonesia ke Jepang*", Seminar Nasional cendekiawan. (2015): 701

²²Izma Khairanisa Harahap dan Astrid Maria Esther: 701

²³Izma Khairanisa Harahap dan Astrid Maria Esther: 702

pendapatan riil negara yang mengimpor barang dan nilai tukar mata uang riil Indonesia dengan negara Jepang, semakin rendah pendapatan riil negara pengimpor maka semakin rendah permintaan terhadap barang ekspor Indonesia. Sebaliknya, semakin tinggi pendapatan riil negara pengimpor maka semakin tinggi jumlah permintaan barang ekspor Indonesia²⁴. Dari hasil metode *Error Correction Model (ECM)* yang dipakai penulis dalam tulisannya, variable ekspor Indonesia ke Jepang dipengaruhi oleh *Gross Domestic Product* Jepang, *Gross Domestic Product* Indonesia dalam jangka panjang dan *Foreign Direct Investment* Jepang di Indonesia sebagai pengaruh paling signifikan dalam jangka pendek.²⁵

Berdasarkan kelima jurnal dan artikel akademis di atas, kebanyakan dari penelitian lebih berfokus pada bagaimana IJEPA berpengaruh pada berbagai bidang di Indonesia. Pada jurnal pertama dan kedua, pemaparan artikel lebih berfokus pada pengaruh IJEPA terhadap perdagangan. Sementara itu jurnal ketiga berfokus pada Pengaruh IJEPA terhadap Industri manufaktur di Indonesia. Pada jurnal ke empat focus pada pemaparan hubungan Indonesia-Jepang dari masing-masing perspektif kedua negara. Sedangkan bahan terakhir lebih focus pada pengaruh IJEPA pada ekspor Indonesia. Dari kelima pemaparan jurnal dan artikel diatas, penulis melihat bahwa belum ada artikel dan jurnal ilmiah yang berusaha menganalisis bagaimana implementasi IJEPA terhadap tenaga kerja khususnya perawat.

²⁴Izma Khairanisa Harahap dan Astrid Maria Esther: 703

²⁵Izma Khairanisa Harahap dan Astrid Maria Esther: 708

1.7 Kerangka Konseptual

Untuk menganalisis dampak dari IJEPA terhadap pengiriman Tenaga Kerja sector formal Indonesia ke Jepang, penulis menggunakan konsep *Bilateral Agreement*. *Bilateral Agreement* adalah kerjasama yang dilakukan dua Negara Kerjasama Indonesia dan Jepang dalam IJEPA sendiri dapat di teliti melalui *hubungan Internasional* karena kerjasama IJEPA dapat digolongkan pada bentuk interaksi antar negara akibat adanya saling ketergantungan dan bertambah kompleksnya kehidupan masyarakat Internasional, dalam hal ini Holsti memberi deskripsi tentang pengertian hubungan Internasional seperti di bawah ini:

“hubungan Internasional adalah segala bentuk interaksi di antara masyarakat negara-negara, baik yang dilakukan oleh pemerintah atau warga negara. Dan meliputi lembaga perdagangan internasional, perdagangan internasional dan perkembangan etika internasional”²⁶

Selanjutnya ada Mochtar yang memberikan gambaran tentang hubungan Internasional, menurutnya hubungan Internasional itu sangat kompleks karena didalamnya terlibat bangsa-bangsa yang berdaulat, sehingga memerlukan mekanisme yang lebih rumit daripada hubungan kelompok manusia di dalam suatu negara. Hubungan internasional juga kompleks karena setiap segi hubungna itu terlibat berbagai seni lain yang koordinasinya tidak sederhana²⁷.

Dalam Hubungan Internasional, politik luar negeri menjadi alat yang dilakukan oleh suatu negara terhadap lingkungan eksternalnya yang merupakan negara lain dalam mencapai, memperjuangkan dan mempertahankan kepentingan

²⁶ Holsti, K.J, (*Politik Internasional: Suatu Kerangka Analisis*)' (terjemahan Wawan Djuanda), (1992): 26

²⁷ Mas'ood, Mochtar, "*Ilmu Hubungan Internasioanl Disiplin dan Meterdologi (Edisi Revisi)*", (1987): 27

nasionalnya. Menurut buku Rencana Strategi Pelaksanaan politik Luar Negeri republic Indonesia (1984-1988), Politik luar negeri diartikan sebagai:

“Suatu kebijakan yang diambil oleh pemerintah dalam rangka hubungannya dengan dunia internasional dalam usaha untuk mencapai tujuan nasional”²⁸

Untuk mencapai kepentingan nasional tersebut, negara-negara ataupun aktor dari negara tersebut akan melakukan kerjasama. Kerjasama antar negara (Internasional) diperlukan guna memenuhi kebutuhan hidup dan eksistensi keberandaan suatu negara dalam pergaulan internasional. Isu dari kerjasama Internasional yaitu berdasarkan pada sejauh mana keuntungan bersama yang diperoleh melalui kerjasama tersebut. Kerjasama Internasional meliputi kerjasama dibidang politik, sosial, pertahanan keamanan, kebudayaan, dan ekonomi.

Berdasarkan bentuknya, kerjasama Internasional terbagi menjadi 4 macam, yaitu sebagai berikut:

1. Kerjasama bilateral

Kerjasama bilateral adalah kerjasama yang dilakukan antara dua negara. Kerjasama ini biasanya dalam bentuk hubungan diplomatik, perdagangan, pendidikan, dan kebudayaan.

2. Kerjasama Regional

Kerjasama regional adalah kerjasama yang dilakukan oleh beberapa negara dalam suatu kawasan atau wilayah. Kerjasama ini biasanya dilakukan karena adanya kepentingan bersama baik dalam bidang politik, ekonomi, dan pertahanan. Contohnya seperti ASEAN dan Liga Arab.

²⁸<http://faiz-marwan.blogspot.co.id/2015/03/pengertian-politik-luar-negri> akses pada 28/03/2019 5.11 AM

3. Kerjasama Multilateral

Kerjasama multilateral adalah kerjasama yang dilakukan beberapa negara. Contohnya adalah PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa).

4. Kerjasama Internasional

Kerjasama Internasional adalah kerjasama antara negara-negara diseluruh dunia.²⁹

Sedangkan bentuk kerjasama dibidang lainnya, seperti:

1. Kerjasama dibidang ekonomi, misalnya FAO, IMF, UNCTAD.
2. Kerjasama dibidang sosial, misalnya ILO, IRO, UNICEF, WHO.
3. Kerjasama dibidang kebudayaan, misalnya IPTEK.
4. Kerjasama dibidang pertahanan, misalnya NATO, CENTO³⁰.

Kerjasama Indonesia-Jepang dalam kerangka IJEPA merupakan kerjasama ekonomi yang dijalankan kedua negara agar saling menguntungkan dengan beberapa ketentuan yang disepakati oleh kedua negara. Ketentuan-ketentuan tersebut tertuang dalam suatu perjanjian yang disebut perjanjian Internasional. Menurut Teuku May Rudy, penggolongan perjanjian Internasional menjadi dua bagian, *Treaty Contract* dan *Law making Treaties*, dengan penjelasan sebagai berikut:

“penggolongan perjanjian internasional sebagai sumber hukum formal adalah penggolongan perjanjian dalam *treaty Contract* dan *law making Treaties*. *Treaty Contract* dimaksudkan perjanjian seperti kontrak atau perjanjian dalam hukum perdata, hanya mengakibatkan hak dan kewajiban

²⁹ A kresnandi, BAB I: 1-2 <http://repository.unpas.ac.id/11971/4/BAB%201.pdf> di akses 31 Maret 2019

³⁰ A kresnandi, BAB I: 2

antara pihak yang mengadakan perjanjian itu. Contoh, perjanjian dwi kewarganegaraan, perbatasan, perdagangan, dan pemberantasan penyeludupan. Sedangkan *Law making Treaties* dimaksudkan perjanjian yang meletakkan ketentuan atau kaidah hukum bagi masyarakat internasional sebagai keseluruhan. Contoh, konvensi, tentang perlindungan perang tahun 1949” (2002: 44)

Perjanjian Internasional bisa diimplikasikan melalui beberapa proses, yaitu perundingan, (negotiation), penandatanganan (signature), dan pengesahan (ratification). Perjanjian dapat berlaku setelah tahap perundingan dan penandatanganan, ada pula perjanjian, biasanya yang penting sifatnya, berlaku harus melalui ketiga tahap perundingan dan persahan (ratification), tergantung jenis perjanjian itu sendiri (mauna, 2001: 83-84).

1.8 Metodologi Penelitian

1.8.1 Batasan Masalah

Dalam menulis penelitian ini, batasan penelitian terbagi menjadi beberapa macam yakni:

- a. Batasan isu : penelitian ini difokuskan pada dampak IJEPA pada tenaga kerja Indonesia khususnya Perawat ke Jepang.
- b. Batasan waktu : penelitian ini difokuskan pada tahun 2008-2015 yaitu awal pelaksanaan IJEPA hingga general Review IJEPA.

1.8.2 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data pada penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sekunder yaitu melalui pengumpulan data, dokumen, dan/atau publikasi resmi seperti literature, artikel, jurnal serta situs internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan.

1.8.1 Teknik pengolahan Data dan Analisa Data

Dalam penelitian ini, penulis akan mencoba untuk melakukan analisis dengan menggunakan teknik analisis berdasarkan Miles dan Huberman, yang pertama adalah mereduksi data, yaitu teknis analisis data yang mengorganisasi dan mengelompokkan data berdasarkan konsep yang disusun secara sistematis. Yang kedua adalah penyajian data, yaitu menghubungkan data dengan kerangka konsep. Dan yang terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi.³¹

Didalam penelitian ini, tahap reduksi data dilakukan dengan menyusun dan mengelompokkan data berdasarkan kata-kata kunci yang relevan seperti, “IJEPA” dan “Tenaga kerja Indonesia sektor formal (Perawat)”. Pada tahap penyajian data, seluruh data yang diperoleh kemudian diurutkan dan dihubungkan berdasarkan kerangka konsep *Bilateral Agreement*. Pada tahap kesimpulan dan verifikasi, ditarik suatu generalisasi bagaimana implementasi IJEPA terhadap pengiriman perawat ke Jepang

1.9 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan ini, penulis akan membagi ke dalam 4 bab, yaitu sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Menjelaskan dan menguraikan isi dari pendahuluan diantaranya adalah: Latar Belakang , Rumusan Masalah, Pertanyaan Penelitian, Tujuan

³¹Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis* (Sage Publication, 1994), 18.

Penelitian, Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Kerangka Konsep, Metode Penelitian.

Bab II : *Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA)*

Bagian ini akan menjelaskan tentang bagaimana terbentuknya *Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement* dan bagaimana dampaknya terhadap Indonesia.

Bab III : Pengiriman Perawat Indonesia ke Jepang

Bagian ini berisi tentang pemaparan bagaimana proses dan tenaga kerja Indonesia dikirim ke Jepang dan ketentuan tertentu terkait IJEPA.

Bab IV : Analisis implementasi IJEPA terhadap perawat Indonesia ke Jepang

Dalam Bab ini, penulis akan menganalisis implementasi IJEPA terhadap pengiriman perawat Indonesia ke Jepang menggunakan konsep *bilateral Agreement*.

Bab V : Kesimpulan

Bab V berisikan tentang kesimpulan dan saran dari hasil analisis penelitian serta jawaban dari hasil perumusan masalah yang telah dianalisis dengan konsep dan teori.